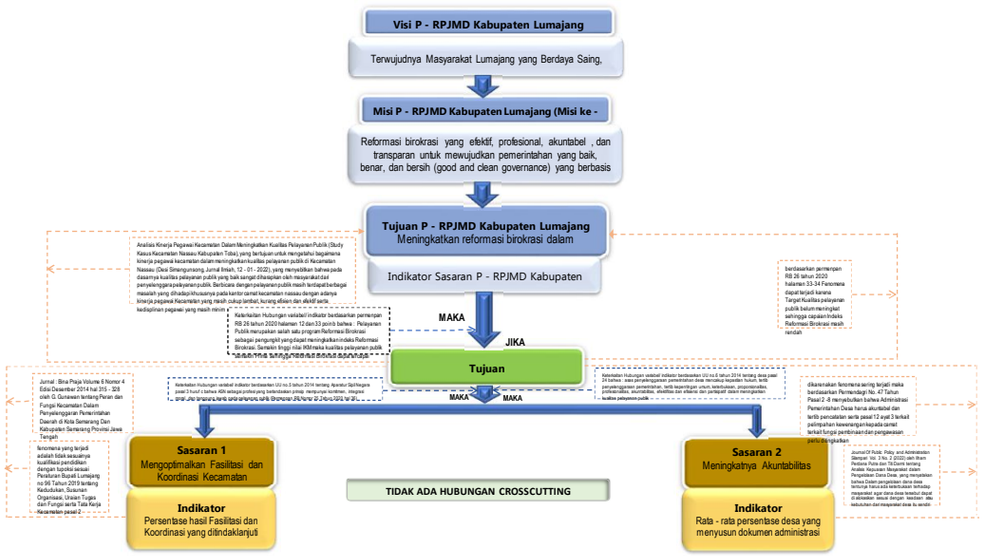
Visi P - RPJMD Kabupaten Lumajang
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Misi P - RPJMD Kabupaten Lumajang (Misi ke -
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis
Tujuan P - RPJMD Kabupaten Lumajang
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam
Indikator Sasaran P - RPJMD Kabupaten
Analisis Kinerja Pegawai Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Study Kasus Kecamatan Nasiau Kabupaten Tolitoli) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nasiau (Desa Simangunsong, Jurnal Ilmiah, 12 - 01 - 2022), yang menyebutkan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan publik yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbicara dengan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi khususnya pada kantor camat kecamatan nasiau dengan adanya kinerja pegawai Kecamatan yang masih cukup lambat, kurang efisien dan efektif serta kedisiplinan pegawai yang masih minim
Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 12 dan 33 poin b. bahwa : Pelayanan Publik merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit yang diapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai IKM maka kualitas pelayanan publik
berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah
MAKA
JIKA
Tujuan
Jurnal : Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014 hal 315 - 328 oleh G. Gunawan tentang Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
fenomena yang terjadi adalah tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan topoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2
Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huf d.1 bahwa ASN sebagai profesi yang berkedudukan pntas mempunyai kompetensi, integrasi
MAKA
MAKA
34 bahwa : kesiapan pengelolaan pemerintahan desa tercukup kualitas hasil, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, ketrbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu dilengkapkan
Sasaran 1
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Indikator
Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
TIDAK ADA HUBUNGAN CROSSCUTTING
Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas
Indikator
Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi
Journal Of Public Policy and Administration Research, Education and Digital Talent Review Rohe dan Ni Dewi tentang Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa Dalam pengelolaan dana desa terhadap hasil suatu ketertukaran terhadap masyarakat agar dana desa tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa kedudukan dan masyarakat desa itu sendiri.

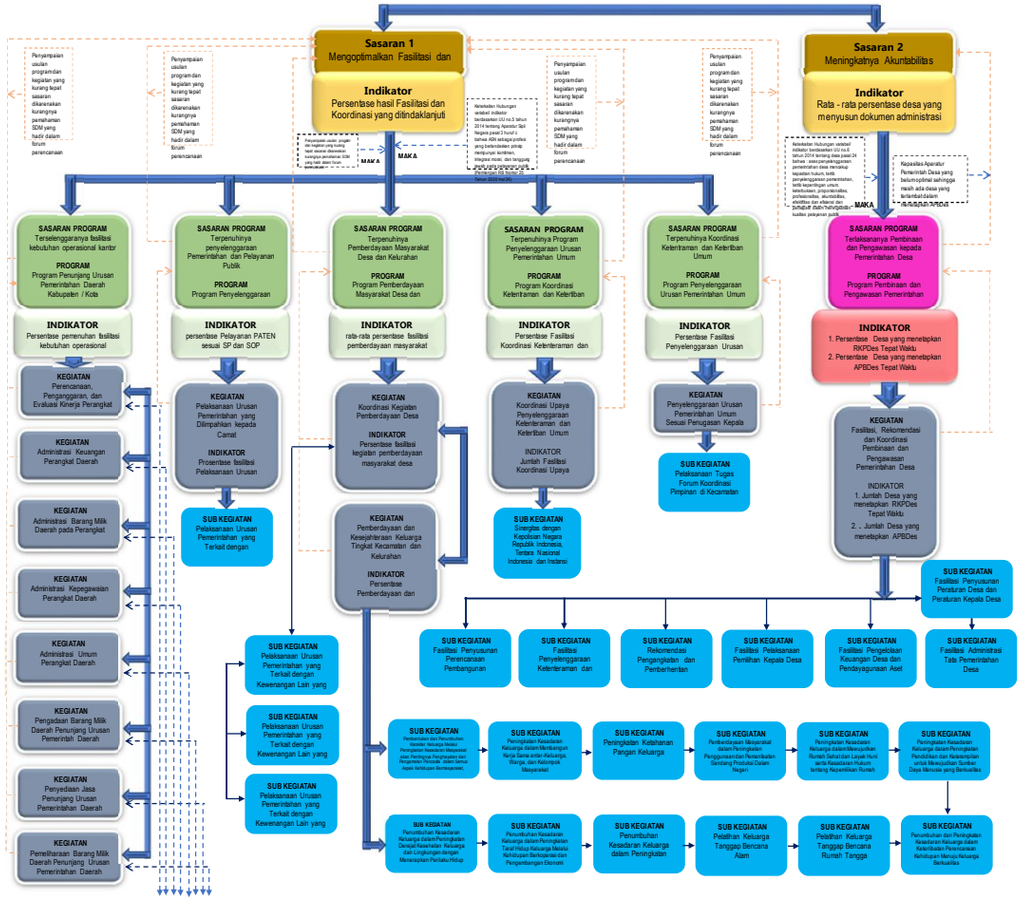
Sasaran 1
Mengoptimalkan Fasilitasi dan
Indikator
Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas
Indikator
Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi
MAKA
SASARAN PROGRAM
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor
PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
INDIKATOR
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional
KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
KEGIATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
KEGIATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
KEGIATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
KEGIATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN PROGRAM
Terpenuhinya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
PROGRAM
Program Penyelenggaraan
INDIKATOR
persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP
KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
INDIKATOR
Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
SASARAN PROGRAM
Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
PROGRAM
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
INDIKATOR
rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat
KEGIATAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
INDIKATOR
Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
KEGIATAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
INDIKATOR
Persentase Pemberdayaan dan
SASARAN PROGRAM
Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
PROGRAM
Program Koordinasi Kelentraman dan Ketertiban
INDIKATOR
Persentase Fasilitasi Koordinasi Kelentraman dan
KEGIATAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
INDIKATOR
Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya
SUB KEGIATAN
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
SASARAN PROGRAM
Terpenuhinya Koordinasi Kelentraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
INDIKATOR
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan
KEGIATAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
SASARAN PROGRAM
Terlaksanaya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa
PROGRAM
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
INDIKATOR
1. Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
2. Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
KEGIATAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR
1. Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
2. . Jumlah Desa yang menetapkan APBDes
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Penyelenggaraan Kelentraman dan
SUB KEGIATAN
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pendidikan dan Ketersediaan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
SUB KEGIATAN
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
SUB KEGIATAN
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
SUB KEGIATAN
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
SUB KEGIATAN
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
SUB KEGIATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemenfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

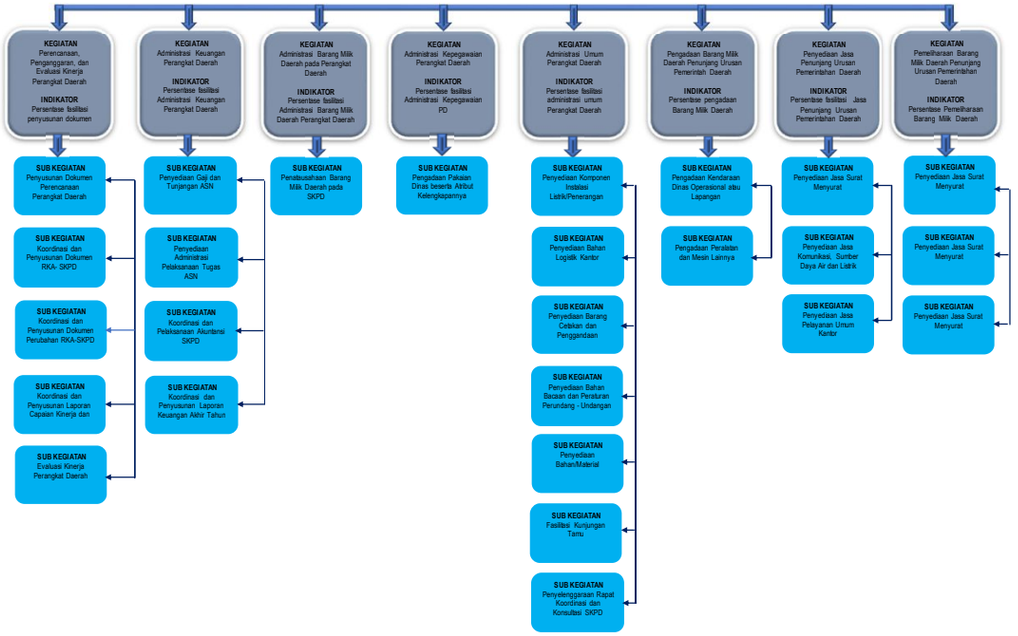
KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi penyusunan dokumen
KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
KEGIATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
KEGIATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
KEGIATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah
KEGIATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
INDIKATOR
Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
SUB KEGIATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SUB KEGIATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SUB KEGIATAN
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SUB KEGIATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SUB KEGIATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SUB KEGIATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Bahan/Material
SUB KEGIATAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SUB KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SUB KEGIATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat